

## Jokowi Belum Terima Usulan Nama Pj Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hingga saat ini belum menerima usulan nama-nama penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan posisi Anies Baswedan.

"Belum sampai ke saya, mungkin baru sampai ke Mendagri," kata Jokowi kepada awak media, Selasa (20/9).

Jokowi menyebutkan, dirinya punya banyak kriteria dalam menunjuk pengganti Anies Baswedan itu. Ia menyebut akan memberitahu kepada masyarakat siapa calon yang akan mengisi kursi Gubernur DKI Jakarta untuk sementara itu.

"Saya kira kriterianya banyak sekali ya nanti saja kalau sudah, nanti kita putusin," ujarnya.

Kemendagri mengungkapkannya, pihaknya tidak me-

nutup kemungkinan bakal mencalonkan nama yang sama seperti DPRD DKI Jakarta untuk pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur ke Kemendagri. Mereka adalah Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

"Nah itu kan juga bisa saja ada kemungkinan-kemungkinan, bisa saja nanti sama (nama calon Pj). Bisa saja. Karena, toh, yang Pak Bahtiar orang Dalam Negeri, yang Pak Sekda sudah dari Pemda.

Pak Heru dari Kementerian dan lembaga," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Iwan kepada wartawan, Sabtu (17/9). ● me

## F-PDIP di DPR Bentuk Dewan Kolonel, untuk "Wangikan" Citra Puan Maharani

JAKARTA (IM) - Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel yang bertugas meningkatkan citra Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani hingga ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota.

"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan, di dapil juga," kata Anggota Fraksi PDI-P Trimedy Panjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana 'mewangkan' Mbak Puan di dapil kita masing-masing," lanjutnya.

Trimedy menyatakan, usulan pembentukan Dewan Kolonel itu muncul dari anggota Fraksi PDI-P Johan Budi. Ia mengusulkan ada hal yang perlu dilakukan Fraksi PDI-P di DPR untuk menunjukkan bahwa mereka adalah loyalis Puan. Meski hal tersebut diusulkan Johan, namun Trimedy yang ditunjuk sebagai koordinator Dewan Kolonel itu.

"Ya sudah, dia bilang, gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian pas Pak Utut (Ketua

Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto) ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak (Puan) senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," beber anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, DPP PDI-P juga telah membentuk tim advance yang bertugas membantu safari politik Puan Maharani ke partai politik.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, tim ini dibentuk merupakan hal yang umum. Dia mengatakan, ini merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.

"Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal untuk terutama untuk mencocokkan waktu, waktunya bisanya kapan," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8) lalu.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan, selain soal waktu, tim advance ini menyiapkan hal-hal yang akan dibahas dalam safari politik, termasuk soal hal-hal yang tidak perlu dibahas dalam pertemuan. ● me



### PEMBUATAN PASPOR MENINGKAT

Pemohon bersiap proses foto di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (20/9). Berdasarkan data kantor Imigrasi setempat pada 2022 sejak umroh dan perjalanan ke luar negeri dibuka, permintaan pembuatan paspor meningkat mencapai 70 persen dibandingkan 2021 dari 30 pemohon menjadi 100 pemohon per hari.

## DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan ini diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (20/9) pagi. Pengambilan keputusan tingkat II ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus. Pengesahan didahului dengan menanyakan sikap fraksi atas RUU PDP tersebut.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" Tanya Lodewijk "Setuju," jawab serentak anggota dewan yang hadir.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna hari ini, RUU PDP sebelumnya telah dibahas

dan disetujui pada tingkat I di Komisi I DPR RI.

Diketahui, pembahasan RUU PDP ini sudah dilakukan sekitar dua tahun lebih.

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP, Abdul Kharis Al-masyari melaporkan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan total 371 daftar inventarisir masalah (DIM) tentang RUU PDP pada tanggal 25 Agustus 2022.

Kharis juga menyampaikan, setelah melalui pembahasan dalam rapat Panja RUU tentang PDP telah terjadi perubahan sistematika RUU dari draf awal yang disampaikan pemerintah.

"Yang semula sistematika RUU tentang PDP terdiri dari 15 bab dan 72 pasal, menjadi 16 bab dan 76 pasal," ujar Kharis dalam laporannya. ● me

# 2 Polhukam

FOTO:ANT



## Pengembangan Kasus Korupsi Zumi Zola, 28 Eks Anggota DPRD Jambi Ditetapkan Tersangka

Sebanyak 28 eks anggota DPRD Jambi ditetapkan sebagai tersangka suap setelah penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup.

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 28 orang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi sebagai tersangka kasus suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018.

"Betul (28 orang jadi tersangka)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (20/9).

Ali masih belum mengungkap nama-nama anggota

DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Ali mengatakan, pengembangan kasus ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Namun, ia masih belum menjelaskan pengembangan apa yang dilakukan KPK.

Lembaga antirasuah itu akan menyampaikan konstruksi perkara secara utuh setelah proses penyidikan dinilai cukup.

"Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi tersangka maupun sangkaan pasal segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah cukup," papar Ali.

"Pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik diantaranya melalui pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi sedang berjalan," ujarnya menambahkan.

Ali mengatakan bahwa perkembangan dari proses penyidikan ini akan tetap disampaikan sebagai salah satu bentuk pengawasan publik dalam upaya penindakan yang KPK lakukan. "Perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana ke Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor)," katanya.

Sebagai informasi, penyidik KPK memeriksa 15 saksi terkait pengembangan kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018, yang juga menjerat mantan Gubernur Zumi Zola. Mayoritas saksi yang diperiksa tersebut merupakan mantan anggota DPRD Jambi.

Ke-15 saksi tersebut adalah Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston. Kemudian, dua Wakil Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaidi Zaidi, serta Plt Kadis Peker-

### RAKER MENPAN RB

### DENGAN KOMISI II DPR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (kanan) didampingi Kepala LAN Adi Suryanto (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9). Rapat tersebut membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023.

● han

## Usut Suap Jual Beli Jabatan di Pemalang, KPK Periksa Camat hingga Sekda Nonaktif

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 11 orang saksi terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang menjerat Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW).

Saksi-saksi yang diperiksa yakni, Hepi Priyanto merupakan Kadiskoperindag, Sis Muhammad M sebagai Camat Pemalang, Rokhilih merupakan Kasubbag Umpeg Dinsos KBPP Pemalang, Mohamad Arifin merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kabupaten Pemalang Tahun 2020 - 25 Juli 2022, dan Supadi merupakan Kabid Sosial Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang,

Kemudian, Noor Hidayati merupakan Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial KBPP Pemalang, Katemin merupakan Penata Pengendalian Penduduk Dinas Sosial KBPP Pemalang, El Retno Prihartini merupakan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Sosial KBPP Pemalang.

Selanjutnya, Bayu Pu-

dawawan merupakan Analis Keluarga Berencana Dinas Sosial KBPP Pemalang, Nisa Arifa merupakan Penata Keahlian dan Kesejahteraan Dinas Sosial KBPP Pemalang, serta M Tarom sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial KBPP Pemalang.

"Hari ini (20/9) pemeriksaan saksi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk tersangka MAW. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (20/9).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Keenam tersangka tersebut yakni, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW).

Kemudian, Komisaris PT Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo (AJW); Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Slamet Masduki (SM); Kepala BPBD Pemalang, Sugiyanto (SG); Kadis Kominfo Pemalang, Yanuaris Nitbani (YN);

serta Kadis PU Pemalang, M Saleh (MS).

Dalam perkara ini, Mukti diduga menerima uang suap sekira Rp4 miliar melalui orang kepercayaannya, Adi Jumal Widodo. Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang dan pihak lain terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).

Adapun, sejumlah ASN yang memberikan suap untuk mendapatkan jabatan di Pemalang tersebut yakni, Slamet Masduki; Sugiyanto; Yanuaris Nitbani; serta M Saleh. Uang suap dikumpulkan melalui Adi Jumal.

Di mana, besaran uang yang dipatok untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp60 juta hingga Rp350 juta.

Tak hanya itu, Mukti diduga juga telah menerima uang dari pihak swasta sebesar Rp2,1 miliar yang bertentangan dengan jabatannya. KPK masih mendalami uang sebesar Rp2,1 miliar yang diterima Mukti tersebut. ● han

## Makin Mesra dengan Panglima TNI, KSAL: Saya Harus Loyal

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono mengatakan, kedekatannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merupakan bentuk loyalitas terhadap atasan dalam melaksanakan tugas.

Ia menyebutkan, loyalitas tersebut karena Andika sebagai Panglima TNI merupakan pengguna kekuatan terhadap prajurit yang dibinanya.

"Panglima TNI itu kan pengguna kekuatan, saya peminca kekuatan. Tentunya dalam kegiatan operasional ya memang ranahnya beliau, bukan masalah mesra," kata Yudo usai menghadiri acara

nonton bateng sinetron Bintang Samudera di Gedung Balai Samudera, Jakarta, Senin (19/9) malam.

Yudo menepis kedekatannya dengan Andika yang disebut sebuah "kemesraan".

Ia pun tidak menjawab saat ditanyakan kedekatannya merupakan sinyal tidak akan ada gejolak dalam pergantian Panglima TNI.

Menurut Yudo, sudah seharusnya antara atasan dan bawahan memiliki kedekatan serta loyalitas dalam pelaksanaan tugas. "Ya namanya saya di bawah beliau ya harus loyal, kan begitu saja. Loyal dalam pelaksanaan tugas tentunya," katanya. ● han

## KPK Jebloskan Penyup Pejabat Pajak ke Lapas Cibinong

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Konsultan Pajak dari Foresight Consulting, Aulia Imran Maghribi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Aulia Imran Maghribi merupakan terpidana penyup oknum pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Jaksa eksekusi Leo Sukoto Manalu telah selesai melaksanakan eksekusi putusan pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Aulia Imran Maghribi ke Lapas Kelas IIA Cibinong," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (20/9).

Aulia Imran Maghribi bakal mendekam di Lapas Kelas IIA Cibinong sekitar dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun) dikurangi lamanya masa penahanan saat proses penyidikan. Hal itu sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Sementara pembebanan pidana lain berupa pembayaran

denda sebesar Rp200 juta dan uang pengganti sebesar Rp750 juta telah lunas dibayarkan dan jaksa eksekutor akan segera menyertarkannya ke kas negara," kata Ali.

Diketahui sebelumnya, dua mantan Konsultan Pajak dari Foresight Consulting, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi dinyatakan terbukti bersalah karena telah menyup sejumlah oknum pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait penghitungan nilai pajak PT Gunung Madu Plantations (PT GMP).

Atas perbuatannya, keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara yang berbeda-beda. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun) penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Aulia Maghribi. Sedangkan Ryan Ronas, divonis tiga tahun dan enam bulan penjara (3,5 tahun) serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. ● han



### LAPORAN HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN BPKH

Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari unsur masyarakat Deni Suardini (kiri), Heru Muara Sidiq (kedua kiri), M Dawud Arif Khan (tengah), Mulyadi (kedua kanan), dan Rojikin (kanan) menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9). Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda.

### PENGUMUMAN

Sehubungan dengan iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT OBM DRILCHEM Tbk di harian International Media tanggal 20 September 2022. Telah terjadi kesalahan pada judul :

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seharusnya

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Harap menjadikan maklum Jakarta, 21 September 2022 Direksi Perseroan

### PENGUMUMAN PT MSI RAJAWALI, berkedudukan di Jakarta Selatan (dalam likuidasi) ("Perseroan")

Berkaitan dengan telah dilakukan pembagian kekayaan Perseroan sebagaimana pengumuman pada Surat Kabar tanggal 8 Desember 2021 serta Berdasarkan Keputusan Seluruh Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan, tanggal 14 September 2022, maka per tanggal 14 September 2022 proses likuidasi Perseroan telah selesai dan status badan hukum Perseroan telah berakhir.

Likuidator Perseroan.